



EKONOMI BIRU SEBAGAI HARAPAN BARU PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Fauzan Lazuardi Ramadhan*

Abstrak

Pengembangan ekonomi biru menjadi peluang strategis bagi Indonesia. Dengan mayoritas wilayahnya lautan serta kekayaan sumber daya maritim yang melimpah, sektor ini seharusnya mampu menjadi motor baru perekonomian nasional. Artikel ini membahas tantangan dan strategi tata kelola ekonomi biru di Indonesia. Namun, implementasi ekonomi biru masih belum optimal karena belum selarasnya perencanaan pusat dan daerah dalam mengintegrasikan konsep ekonomi biru; ketiadaan lembaga khusus yang mengoordinasikan pengawasan; serta keterbatasan pembiayaan untuk mendukung program-program pendukungnya. Untuk itu, diperlukan strategi seperti sinkronisasi perencanaan, pemetaan potensi, tagging tematik APBN ekonomi biru, perbaikan tata kelola kelembagaan, penyiapan pendanaan, serta perumusan Key Performance Index (KPI) guna mengoptimalkan pengimplementasiannya. Komisi XI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memberlakukan tagging tematik bagi APBN yang mendukung ekonomi biru serta melakukan integrasi konsep ekonomi biru dalam dokumen perencanaan dan penyusunan KPI yang terukur. Dengan langkah tersebut, diharapkan ekonomi biru dapat menjadi sumber baru bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Pendahuluan

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengadakan *workshop* “Konsolidasi Integrasi Ekonomi Biru dan Pendanaan Biru (*Blue Finance*) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 2025–2029” pada 2 Desember 2025. Kegiatan tersebut menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam merumuskan mekanisme pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan sebagai fondasi pengembangan ekonomi biru (Winarto, 2025).

Urgensi tersebut muncul seiring karakteristik geografis Indonesia yang didominasi oleh lautan, sehingga menyimpan sumber daya maritim yang dapat dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan berkelanjutan. Pada Triwulan III Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,04% (BPS, 2025). Meskipun demikian, capaian tersebut masih belum memenuhi target pemerintah yang menargetkan pertumbuhan 8% pada akhir tahun 2029.

*) Analisis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: fauzan.ramadhan@dpr.go.id

Dalam konteks tersebut, dibutuhkan terobosan strategis untuk menjadi sumber pertumbuhan baru, dan ekonomi biru menjadi salah satu alternatif yang paling menjanjikan. United Nations Development Programme (UNDP) memperkirakan ekonomi biru secara global berpotensi menghasilkan Rp99,76 kuadriliun per tahun (Berty, 2025). Namun, di Indonesia potensi tersebut belum termanfaatkan secara optimal, hal ini terlihat dari kontribusi sektor maritim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru mencapai 8,1% (Fauzan, 2025).

Dengan kekayaan kemaritiman yang dimiliki, ekonomi biru dipandang mampu menjadi harapan baru dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bappenas menilai pengembangan ekonomi biru berbasis kawasan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi (Alatas, 2025). Artikel ini akan mengulas tantangan dan strategi tata kelola ekonomi biru di Indonesia.

Tantangan Penerapan Ekonomi Biru

Ekonomi biru telah diinternalisasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru dengan mengedepankan penciptaan nilai tambah ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, ekonomi biru juga mendukung pencapaian Asta Cita poin dua dari janji Presiden Prabowo Subianto.

Kontribusi ekonomi biru terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tercermin dari pertumbuhan PDB sektor maritim. Kontribusi sektor maritim pada PDB nasional pada periode 2019–2023 berada pada kisaran 7,77–8,14 (BPS, 2024). Kontribusi ini dirasakan masih minim jika ingin ekonomi biru ini menjadi poros utama dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, perlu adanya kerja keras untuk mencapai target kontribusi PDB kemaritiman menjadi 15% pada tahun 2045.

Pada tahun 2024 Bappenas telah menerbitkan buku “Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia”. Peta jalan ini dibuat untuk mengonsolidasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan. Peta jalan ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap pemangku kebijakan baik di tingkat daerah maupun pusat untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Penerapan peta jalan ekonomi biru ini dirasakan belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengimplementasiannya. Permasalahan yang dihadapi mencakup permasalahan sinergitas, kelembagaan, dan pendanaan.

Sinergitas antara perencanaan di tingkat pusat (kementerian/lembaga) ataupun dengan pemerintah daerah dirasakan masih menjadi tantangan. Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menekankan bahwa kemajuan sektor ekonomi biru sangat dipengaruhi oleh sinergi lintas sektor (Alatas, 2025). Kurangnya sinergitas kebijakan dan implementasi kebijakan ini menjadi suatu tantangan tersendiri dalam pengembangan ekonomi biru di Indonesia (Alifa & Zahidi, 2024).

Permasalahan kedua adalah kelembagaan. Saat ini yang menjadi kendala adalah tidak adanya lembaga khusus yang melakukan koordinasi serta pengawasan penerapan ekonomi biru di Indonesia. Pasalnya, terdapat kurang lebih 26 kementerian/lembaga yang berpotensi relevan dengan penerapan ekonomi biru (Bappenas, 2024). Adanya lembaga khusus, diharapkan akan mampu meningkatkan efektivitas dalam hal komunikasi, sinkronisasi, dan koordinasi lintas sektor dalam mengendalikan penerapan kebijakan ekonomi biru sebagai agenda pembangunan nasional.

Permasalahan terakhir adalah kerangka pendanaan. Pengimplementasian kebijakan ekonomi biru memerlukan pendanaan yang memadai. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membiayai program pembangunan nasional mengharuskan untuk mencari sumber pendanaan inovatif. Belum adanya kerangka pendanaan yang jelas untuk membiayai program-program pendukung implementasi menjadi sebuah tantangan bersama. Untuk itu, diperlukan strategi yang efektif dan tepat sasaran agar penerapan ekonomi biru dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Strategi Tata Kelola Ekonomi Biru

Dampak nyata ekonomi biru terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada proses perencanaan dan pengimplementasian yang terukur. Ekonomi biru bukan hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kelangsungan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Sebagai salah satu Asta Cita dari Presiden, ekonomi biru harus menjadi fokus utama dalam berbagai kebijakan yang diambil. Tata kelola yang baik, diimbangi dengan pengawasan terhadap program-program yang dapat mendukung ekonomi biru menjadi sebuah keharusan guna meningkatkan kontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi.

Berkaca dari berbagai kendala yang dihadapi selama ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut. *Pertama*, sinkronisasi antarkementerian/lembaga (K/L) dan juga pemerintah daerah dalam menginternalisasi konsep ekonomi biru di dokumen perencanaan. Sinkronisasi ini menjadi langkah awal untuk menerjemahkan konsep ekonomi biru terhadap program-program pembangunan yang akan dilakukan.

Kedua, pemetaan potensi ekonomi biru. Pemetaan ini berfokus pada program-program hingga level rincian *output* (RO) pada K/L yang dapat mendukung penerapan ekonomi biru. Selain pemetaan program, pemetaan secara spasial juga diperlukan guna mengetahui potensi daerah yang dapat dijadikan fokus utama pengembangan ekonomi biru secara optimal. Pengembangan tersebut dapat difokuskan pada Maluku sebagai *hub* kemaritiman wilayah timur Indonesia serta Sumatra sebagai mata rantai utama bioindustri dan kemaritiman berdaya saing dan berkelanjutan (Bappenas, 2025).

Ketiga, pemberlakuan *tagging* ekonomi biru pada APBN. *Tagging* ekonomi biru ini dilakukan kepada RO yang berkaitan dengan ekonomi biru yang dirancang untuk dapat menyinergikan proses perencanaan dan penganggaran secara tematik. Melalui *tagging* ini diharapkan Pemerintah dapat mengidentifikasi pengeluaran dan manfaat dari proyek pemerintah, terutama dalam kontribusinya mendukung ekonomi biru. *Keempat*, perbaikan tata kelola kelembagaan melalui penunjukan K/L yang bertanggung jawab dalam implementasi ekonomi biru. Penunjukan penanggung jawab akan mempermudah komunikasi, sinkronisasi, dan koordinasi lintas sektor dalam mengendalikan penerapan kebijakan ekonomi biru sebagai agenda pembangunan nasional.

Kelima, penyiapan pendanaan melalui sumber pembiayaan inovatif. Keterbatasan APBN menuntut pemerintah untuk dapat mencari inovasi pembiayaan program pembangunan. Pemetaan pendanaan saat ini sudah mulai disusun oleh Bappenas untuk menghadapi tantangan pembangunan ekonomi yang lebih efektif (Bappenas, 2025). *Keenam*, penyusunan *Key Performance Index* (KPI) yang jelas. Penyusunan KPI didasarkan pada target yang terukur dalam pengimplementasian ekonomi biru. KPI yang terukur dan jelas, akan memberikan evaluasi dampak yang baik bagi perbaikan perencanaan implementasi ekonomi biru ke depannya.

Keberhasilan implementasi ekonomi biru harus dijadikan semangat bersama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan degradasi lingkungan, khususnya di laut. Proses perencanaan hingga evaluasi yang matang serta sinergitas antar-K/L dan pemerintah daerah yang baik diharapkan mampu memberikan daya ungkit dalam pencapaian ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru. Harapannya, pengembangan ekonomi biru di Indonesia dapat menjadi rujukan bagi negara-negara di ASEAN (Alatas, 2025).

Penutup

Kekayaan sumber daya maritim yang melimpah menjadikan pengembangan ekonomi biru sebagai salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti belum selarasnya perencanaan di tingkat pusat dan daerah dalam mengintegrasikan konsep ekonomi biru; ketiadaan lembaga khusus yang mengawasi pengimplementasiannya; serta keterbatasan pembiayaan untuk menjalankan program-program pendukung.

Komisi XI DPR RI memiliki peran strategis untuk mendorong ekonomi biru memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi anggaran, Komisi XI DPR RI dapat mendorong Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk melakukan *tagging* terhadap RO yang mendukung ekonomi biru. Sementara itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi XI DPR RI perlu memastikan Bappenas melakukan sinkronisasi perencanaan antar-K/L dengan menginternalisasi ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru, sekaligus mendorong Bappenas untuk menyusun KPI secara terukur agar dampak dari ekonomi biru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan berkelanjutan.

Referensi

- Alatas, M., B., I., & Setyorini, V., P. (2025, Agustus 6). Bappenas: Indonesia punya fondasi sosial kuat kembangkan ekonomi biru. <https://www.antaranews.com/berita/5017917/bappenas-indonesia-punya-fondasi-sosial-kuat-kembangkan-ekonomi-biru>
- Alatas, M., B., I., & Salim, A. (2025, November 28). Bappenas harap pengembangan ekonomi biru RI jadi rujukan ASEAN. <https://www.antaranews.com/berita/5272749/bappenas-harap-pengembangan-ekonomi-biru-ri-jadi-rujukan-asean>
- Alifa, N., N., & Zahidi, M., S. (2024). Pengembangan ekonomi biru sebagai strategi indonesia menuju ekonomi maju. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 38(1), 48–65.
- Bappenas. (2025, November 27). Bappenas–UNDP gelar lokakarya regional, petakan potensi pendanaan dukung pelaksanaan ekonomi biru di ASEAN. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-undp-gelar-lokakarya-regional-petakan-potensi-pendanaan-dukung-pelaksanaan-ekonomi-biru-di-asean-Fn7HZ>
- Bappenas. (2024). Peta jalan ekonomi biru Indonesia edisi 2. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Upload%20Terbaru/EBOOK%20IND%2017102024_Indonesia%20Blue%20Economy%20Roadmap-2nd%20Edition.pdf
- Berty, T., T., S. (November 27). UNDP: Ekonomi biru bisa hasilkan rp 99,76 kuadriliun per tahun, ilmu pengetahuan jadi pondasi kebijakan. <https://www.liputan6.com/global/read/6222183/undp-ekonomi-biru-bisa-hasilkan-rp-9976-kuadriliun-per-tahun-ilmu-pengetahuan-jadi-pondasi-kebijakan?page=2>
- BPS. (2024). *Statistik sumber daya laut dan pesisir 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/d622648a533da3bc907e8b3a/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2024.html>
- BPS. (2025, November 5). Ekonomi Indonesia triwulan III-2025 tumbuh 5,04 persen (Y-on-Y). <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/2478/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2025-tumbuh-5-04-persen-y-on-y.html>
- Fauzan, A., F., & Muhiddin, A., H. (2025, November 6). AHY targetkan kontribusi sektor maritim ke PDB naik jadi 9,1 persen. <https://www.antaranews.com/berita/5224025/ahy-targetkan-kontribusi-sektor-maritim-ke-pdb-naik-jadi-91-persen>
- Winarto, Y. (2025, Desember 4). Melalui skema KPBU, IIF dorong akselerasi ekonomi biru di makassar. <https://keuangan.kontan.co.id/news/melalui-skema-kpbu-iif-dorong-akselerasi-ekonomi-biru-di-makassar>

